

**MAKNA PENDIDIKAN NAHDLATUL WATHAN: TELAAH
INTERPRETATIF VISI KEBANGSAAN DAN RELIGIUS:
REFLEKSI PEMIKIRAN DAN PERJUANGAN KYAI
HAMZANWADI 1904-1997**

Khirjan Nahdi

STKIP Hamzanwadi Selong

ABSTRACT

This study aims at finding out the meaning of education and education science in Nahdlatul Wathan Institution in the book "*Sejarah Visi Kebangsaan dan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid 1904-1997*". This study is categorized into Historic Research (the history of education) through critical hermeneutics of some (non) written historic sources.

Based on the critical analysis results can be understood that early, Nahdhatul Wathan as educational institution is a tool of social reconstruction through religious education because of the social and political conditions in that time. And the further development, Nahdlatul Wathan Education is not only as a tool but also a final object because of education is considered as a need to accumulate the social development. Nowadays, Nahdlatul Wathan Education is understood as a tool and final object.

In the science of education, the meaning of Nahdlatul Wathan education as a tool and a final object is supported by some components of education science standard, such as foundation and principles, function, content, objective, method, formal and material objects.

Keywords: Meaning of Education

PENDAHULUAN

Telaah sejarah pendidikan (makna pendidikan dan ilmu pendidikan) buku Visi Kebangsaan dan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan *Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid 1904-1997*) didasari pertimbangan bahwa buku ini layak dikategorikan buku sejarah (sejarah pendidikan) (Juraid, 2006). Kelayakan tersebut didasari pada beberapa pertimbangan; **pertama**, secara substansi (materi), buku ini berisi tentang perjalanan panjang organisasi Nahdlatul Wathan (selanjutnya

disingkat NW) mengelola lembaga pendidikan (pendidikan Islam dan pendidikan umum) sejak 1936 hingga kini, dan insyaallah sampai seterusnya. **Kedua**, dari sudut metodologi sejarah, fakta-fakta yang dikumpulkan telah melalui tahapan seleksi dan identifikasi (*selecting and identifying*) sebelum ditetapkan sebagai fakta sejarah pendidikan NW, selanjutnya dikonfrontir dengan fakta-fakta baru (*reorganizing*), kemudian melihat fakta secara langsung (*experimenting*) sebelum sampai pada pemaknaan fakta. Pemaknaan atas fakta sejarah atas fakta dilakukan secara terbuka berdasarkan sudut pandang penulis sejarah sebagai dasar pemahaman generasi mandatang atas tokoh sejarah (Popper, dalam Meyerhoff, 1959, Barnadib, 2007). Selain bersifat terbuka oleh penulis sejarah dan pembaca tulisan sejarah (buku sejarah), pemaknaan dilakukan tidak terbatas pada ruang dan waktu tertentu, tetapi berkembang secara evolutif dengan didasari pada argumentasi atas fakta dan metodologi penemuan fakta (*inquiry*) (Dewey, dalam Meyerhoff, 1959). **Ketiga**, dari sudut pandang metode sejarah dalam pendidikan, buku ini merupakan sumber kedua, yakni evaluasi atas buku sejarah (Brikman, 1949), di mana di dalamnya terdapat deskripsi tentang sejarah pendidikan, adanya periodisasi sejarah pendidikan, adanya peristiwa sejarah pendidikan, dan keberadaan tokoh sejarah pendidikan (Barnadib, 2007). **Keempat**, buku ini sudah menjadi konsumsi publik terbukti melalui beberapa sambutan beberapa kalangan ketika terbit pertama kali (pejabat dan akademisi).

Penulis buku ini adalah Muhammad Noor (staf pengajar Fakultas Syariah IAIA Jakarta), Muslihan Habib (Pengasuh Ponpes NW Jakarta), dan Muhammad Harfin Zuhdi (staf pengajar Fakultas Syariah UIN Jakarta), dan diterbitkan pertama kali oleh PT Logos Wacana Ilmu bekerja sama dengan Ponpes NW Jakarta, pada bulan Juli 2004. Selain sambutan dan catatan prolog, buku ini terdiri atas lima bagian dan delapan belas bab). Khusus telaah sejarah pendidikan (makna pendidikan dan ilmu pendidikan) atas buku ini terfokus pada bagian kedua: Silsilah, Pendidikan, dan Perjuangan *Tuan Guru* Kyai Muhammad Zainuddin Abdul Majid, bab IV: Perjuangan dan Pengabdian Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Fokus ini dipilih mengingat bagian dan bab ini berisi catatan tentang perjalanan tokoh dalam mengembangkan madrasah (pendidikan Islam) dan pendidikan umum sejak tahun 1937 hingga akhir hayat beliau tahun 1997. Untuk

memperkuat fakta sejarah pendidikan yang dikembangkan tokoh, tulisan ini dilengkapi dengan dokumen (foto) aktivitas tokoh selaku tokoh sejarah pendidikan melalui NW di Pulau Lombok, sebagai bagian akhir dari buku telaahan ini.

Untuk membantu pemahaman pembaca atas beberapa kata dalam tulisan ini, penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang umum dipakai oleh para santri di lingkungan Ponpes NW maupun masyarakat (Sasak), seperti *Tuan Guru* yang diambil dari kata 'tuan' "orang yang sudah berhaji", dan 'guru' "orang yang menyampaikan ilmu". Namun, gabungan dua kata tersebut hanya diperuntukkan untuk sebutan seseorang yang menyampaikan ilmu agama (Islam), sudah berhaji, dan yang bersangkutan lama menuntut ilmu di beberapa negara Timur Tengah, seperti Saudi Arabia dan Mesir. Sosok yang sama dimiliki oleh pondok pesantren di Jawa dengan sebutan Kyai.

Ada kemungkinan muncul pertanyaan bahwa bukankah secara kelembagaan pendidikan pesantren berbeda dengan pendidikan umum? Jika memperhatikan bentuknya secara fisik (dulu hingga saat ini), ya! Namun dalam konteks sejarah, tidak semata-mata bentuk yang diperhatikan, melainkan makna pendidikan dan ilmu pendidikan apa yang dapat dipelajari dalam dinamika dari awal hingga perkembangan sekarang. Apalagi jika melihat perkembangan dan dinamika saat ini bahwa pendidikan di bawah Nahdlatul Wathan sebagai pesantren mengelola pendidikan agama dan pendidikan umum pada semua tingkat dan satuan pendidikan, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

Telaah makna pendidikan dan ilmu pendidikan melalui buku ini mengandung dua maksud. **Pertama**, secara keilmuan, telaah ini merupakan upaya implementasi pemahaman atas makna pendidikan dan ilmu pendidikan dalam perjalanan sejarah lembaga pendidikan. **Kedua**, sebagai dokumen tertulis berikutnya yang dapat dimanfaatkan sebagai landasan pengembangan lembaga pendidikan, khususnya Madrasah NWDI dan NBDI, karena dengan memahami sejarah dan maknanya (pendidikan dan ilmu pendidikan) perkembangan madrasah rikutnya dapat direncanakan dengan lebih strategis.

Untuk memudahkan pembahasan, telaah ini dibagi dalam beberapa bagian; **pertama**; pendahuluan yang menguraikan tentang keberadaan buku dalam hal kelayakan dari beberapa sudut pandang; substansi, metode dan nilai sejarah, dan kemasyarakatan. **Kedua**; deskripsi buku yang menguraikan ringkasan sejarah berdirinya Madrasah NWDI dan NBDI. **Ketiga**; dasar teologi, yang menguraikan sekilas tentang pentingnya pendidikan berdasarkan sumber al-Qur'an dan Hadist. Dasar filosofis, keberadaan NWDI dan NBDI dari sudut sejarah sebagai fenomena masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dasar historis, keberadaan Madrasah NWDI dan NBDI dalam konteks sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. **Keempat**; sumber sejarah yang digunakan penulis buku sejarah **Kelima**; makna pendidikan yang terdiri atas pendidikan sebagai apa dan pendidikan untuk siapa. **Keenam**; makna ilmu pendidikan, yang menguraikan pendidikan sebagai sistem (dasar dan asas, fungsi, tujuan, dan isi), ilmu pendidikan sebagai ilmu (objek formal, objek material, dan metode). Bagian **ketujuh**, simpulan.

DASAR TEOLOGIS, FILOSOFIS, DAN HISTORIS

Untuk menjelaskan makna pendidikan dan ilmu pendidikan dalam konteks sejarah pendidikan Nahdlatul Wathan melalui Madrasah NWDI dan NBDI, perlu dikemukakan dasar teologis:

1. *“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”* (QS ar-Ra'd (13): 11.
2. *“Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim”* (sumber: Muhammad Jamal ad Din al Qasimi ad Dimasyqi, Mauizah al Mu'minin min ihya' ulum ad Din (ttp: Maktabah at Tijariyah al Kubra, tt), hlm.7.

Pertama, dasar teologis dari QS ar Ra,d (13) perlu dikemukakan pada tulisan untuk mengakomodasi pertimbangan tokoh pendidikan yangbdimaksud dalam tulisan ini, yakni menuju suatu cita perubahan peradaban manusia, yang ketika itu berada dalam kondisi terpuruk (sosial, pendidikan, dan agama), yang salah satunya akibat kolonialisme. Jadi, ide dasar pendirian lembaga pendidikan dalam konteks ini adalah perubahan menuju kehidupan yang lebih baik.

Kedua, hadist Rasulullah SAW di atas tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim, sebagai dasar pertimbangan untuk mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam perjalanan keberadaan lembaga pendidikan dengan memberikan kesempatan yang sama antara pria dan wanita, dengan dibukanya Madrasah NBDI bagi kaum wanita (Noor dkk, 2004:190).

Selain dasar teologis, perlu juga dikemukakan **dasar filosofis** tentang keberadaan lembaga pendidikan Nahdlatul Wathan (madrasah NWDI dan NBDI), khususnya yang berhubungan dengan makna pendidikan. Secara filosofis, yang dapat dimaknai adalah masa lalu, dan masa kini sedang berjalan, sementara masa depan masih direncanakan (Juraid, 2006). Sejalan dengan pernyataan ini adalah bahwa makna pendidikan Nahdlatul Wathan mengalami perubahan, karena fakta dan fenomena sejarah terus berkembang secara evolutif (Dewey, dalam Meyerhoff, 1959). Perubahan makna pendidikan Nahdlatul Wathan dapat dibuktikan melalui perubahan pendidikan dalam kerangka sistemik, seperti tujuan pendidikan, kelembagaan, kyai/guru/ustaz, santri/siswa, pembiayaan, dan hubungan madrasah dengan masyarakat.

Selanjutnya, **secara historis**, situasi pendidikan di seluruh wilayah kolonialisme Belanda, termasuk Pulau Lombok, pendirian lembaga pendidikan tidak didasarkan pada pertimbangan egalitarianisme (terbuka untuk semua), tetapi didasarkan pada pertimbangan elitisme (kelompok tertentu), semata-mata untuk kepentingan kolonial Belanda. Karena itu, lembaga pendidikan yang dibangun/didirikan sangat kental dengan kepentingan pemerintah kolonial Belanda, antara lain agar anak-anak bumi putra dapat membaca dan memahami undang-undang kolonial Belanda (Mestoko dkk, 1985:107-115). Fenomena sejarah seperti ini sebagian besar terjadi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sementara di Kepulauan Sunda Kecil (Bali, NTB, dan NTT) belum begitu tampak, sehingga inisiatif pendirian lembaga pendidikan (madrasah) ketika itu merupakan tonggak awal perjalanan sejarah pendidikan, khususnya di Pulau Lombok.

METODE DAN SUMBER SEJARAH

Metode yang digunakan dalam telaah dokumen sejarah (buku sejarah ini) adalah metode hermenutika, yakni metode interpretasi atas dokumen tertulis. Metode ini melihat tiga hubungan sekaligus, yakni penulis, teks, dan pembaca (Palmer, 2003). Sumber sejarah yang dimaksud dalam konteks ini adalah sumber-sumber informasi (tertulis dan non tertulis) yang dijadikan sebagai dasar penulis sejarah untuk menulis buku sejarah. Kaitan dengan sumber sejarah, Barnadib (2007) mengemukakan keberadaan sumber sejarah dilihat berdasarkan kualifikasi dan otentisitasnya. Selanjutnya, Brickman (1949) membagi sumber sejarah menjadi dua; sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dapat berbentuk dokumen hukum, keputusan lembaga peradilan, dokumen institusi, dokumen pelaksanaan, dokumen publikasi, majalah, sumber non sekolah, seperti kontrak kerja sama dan bisnis, dokumen publik, bangunan gedung yang masih utuh, dan dokumen foto. Sumber kedua dapat berbentuk hasil evaluasi atas buku tentang sejarah yang ditulis sebelumnya, hasil evaluasi dari institusi sejarah, dan monografi.

Berdasarkan pemahaman atas sumber sejarah di atas, penulis sejarah menulis buku ini berdasarkan dua kategori sumber, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sebagai sumber primer, penulis mendasari tulisannya, pertama pada dokumen hukum dalam bentuk akta pendirian madrasah yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kedua, dokumen pelaksanaan pendidikan madrasah dalam bentuk rumusan-rumusan kurikulum dan mata pelajaran. Ketiga, bangunan gedung yang masih utuh dengan ornamen bangunan zaman belanda, termasuk tulisan latin dengan ejaan Soewandi. Keempat, dokumen foto, yakni foto-foto tokoh yang sedang menyelenggarakan proses pembelajaran dengan santri-santrinya. Sebagai sumber kedua, penulis memanfaatkan hasil wawancara mendalam dengan murid-murid tokoh yang secara langsung menempuh ilmu pada tokoh sejarah ini. Walaupun sumber sejarah ini tidak masuk dalam kategori sumber sejarah dalam kategori Brickman, dan tampaknya penulis sejarah tidak menjadikan informasi ini sebagai informasi sejarah yang signifikan mengingat kecenderungan tendensi dari informan tentang tokoh sejarah.

ANALISIS MAKNA PENDIDIKAN

Pemaknaan atas fenomena pendidikan, termasuk pendidikan melalui NWDI dan NBDI harus diletakkan pada kerangka sistem pendidikan, khususnya yang menyangkut konteks sosial pendidikan dan tujuan pendidikan. Jika konteks sosial pendidikan berubah, perubahan atas rumusan tujuan pendidikan niscaya akan berubah pula, demikian sebaliknya, perubahan tujuan pendidikan akan menuntut perubahan konsteks sosial pendidikan (konteks sosial secara internal; dalam lembaga pendidikan, dan secara eksternal; lembaga pendidikan dengan masyarakat).

Untuk memahami makna pendidikan (mikro maupun makro) dari waktu ke waktu, diperlukan adanya pemahaman yang komprehensif atas sejarah pendidikan. Maksud ini menghendaki pentingnya belajar sejarah pendidikan ketika pendidikan itu berlangsung. Dengan mempelajari sejarah pendidikan, akan mengantarkan kita pada arah kemampuan berpikir edukatif yang kreatif (Wilds dalam Barnadib, 1975). Dengan mempelajari sejarah pendidikan akan diperoleh makna dari setiap tahap perkembangan dan perubahan pendidikan dari suatu lembaga pendidikan.

Sejarah pendidikan tidak lepas dari keberadaan manusia, baik sebagai tokoh sejarah pendidikan maupun selaku masyarakat ketika sejarah pendidikan terjadi. Jika berbicara tentang manusia, yang dimaksud adalah manusia dengan keseluruhan nilai yang diyakini dan budaya yang diembannya. Untuk memperjelas pernyataan tersebut, dapat dirujuk kembali pandangan kaum esensialisme, bahwa manusia adalah makhluk budaya, artinya makhluk yang hidupnya dilingkupi oleh nilai dan norma budaya (Barnadib, 2002). Karena itu, untuk memahami makna pendidikan dalam perspektif sejarah pendidikan, termasuk juga NWDI dan NBDI, ada baiknya kembali pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan menurut pandangan esensialisme, yang memaknai pendidikan berdasarkan keberadaan manusia sebagai makhluk budaya, dan tujuan-tujuan hidup manusia dalam konteks budaya yang diembannya (Knight, 1982). Berdasar pada pandangan esensialis tentang manusia, yang termasuk juga bagaimana manusia mengolah pola pikirnya melalui pendidikan untuk dapat menjadi makhluk berbudaya, pemaknaan pendidikan NWDI dan NBDI terkait dengan; 1) pendidikan sebagai apa?, dan 2) pendidikan untuk siapa?

1. Pendidikan Sebagai Apa?

a. Pendidikan sebagai Alat

Jawaban atas pertanyaan bahwa pendidikan dipandang sebagai apa menurut pandangan esensialis berhubungan dengan rumusan-rumusan tujuan pendidikan dalam kerangka sistem pendidikan. Kohnstamm dan Gunning (dalam Kartono, 1997) menyatakan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan diri dan penemuan diri secara etis sesuai dengan suara hati nurani. Masih dari sumber yang sama, Dewey mengemukakan, “pendidikan adalah segala sesuatu yang secara bersamaan dengan pertumbuhan; pendidikan sendiri tidak punya tujuan akhir di balik dirinya. Dari dua pandangan ini, pendidikan dihajatkan untuk penemuan identitas diri sebagai makhluk berbudaya dan berperadaban melalui sebuah proses (pendidikan). Dalam proses, pendidikan tidak akan bermakna apa pun bila tidak dimaksudkan untuk menyesuaikan individu pembelajar dengan perkembangan di mana proses pendidikan itu berlangsung (penyesuaian atas apa yang terjadi; keluar dari tekanan, penindasan, kebodohan, rasialisme, kemiskinan, dan sejenisnya).

Menilik fenomena budaya dalam konteks relasi antarmanusia ketika awal munculnya ide pendirian NWDI dan NBDI, diwarnai oleh suasana sosiokultural dan religius yang sangat terbelakang akibat tekanan kolonialisme (Belanda dan Jepang).

Muncul pemikiran pendiri NWDI dan NBDI, bahwa semua fenomena peradaban yang sedemikian tidak manusiawi tersebut harus diubah ke arah yang lebih baik, dengan menciptakan keberadaan manusia/masyarakat (Sasak) pada suasana peradaban yang berbudaya dan manusiawi. Manusia yang berbudaya dan manusiawi adalah manusia yang memahami tujuan-tujuan hidupnya sebagai individu dan bagian dari masyarakat sesuai norma yang dianut, berikut memahami ajaran-ajaran agamanya secara benar. Bagaimana semua itu dapat dicapai, pendiri NWDI dan NBDI berkeyakinan hanya melalui kemampuan membaca dan menulis (pada tahap awal). Karena persoalan agama dianggap menjadi persoalan mendasar yang perlu diperbaiki ketika itu, maka

kemampuan yang perlu dibangun dan dibentuk adalah pemahaman bidang agama (Islam) melalui kemampuan membaca dan menulis. Untuk sampai pada kemampuan membaca dan menulis, diperlukan adanya suatu proses (upaya), lembaga, konteks, dan sistem-sistem lainnya yang mendukung. Keseluruhannya dihayatkan untuk membentuk pribadi-pribadi dan masyarakat (Sasak) ketika itu menjadi individu dan masyarakat yang berbudaya dan berperadaban, sehingga mereka memiliki kesadaran bahwa mereka sedang dalam tekanan pihak lain yang merugikan mereka. Melihat maksud pendirian NWDI dan NBDI, pendidikan melalui kedua lembaga ini adalah sebagai **instrumen perjuangan** untuk membangun kesadaran atas kondisi sosiokultural dan religius yang berkembang ketika itu.

Jika kita berbicara bahwa pendidikan adalah sistem, yang satu sub-sistem dengan lainnya saling terkait, minimal satu pertanyaan mendasar akan muncul, apa tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pendiri NWDI dan NBDI? Karena, jika pendidikan melalui NWDI dan NBDI dihayatkan sebagai sarana semata-mata, bagaimana proses pendidikan tersebut dijalankan? Buchori (1994) menjelaskan, “jika pendidikan dipandang hanya sebagai sarana (dalam kondisi apa pun), dimungkinkan terjadi kelengahan dalam menjalani proses pendidikan itu”. Pendidikan melalui NWDI dan NBDI ketika bukannya tanpa tujuan. Model pendidikan apa pun tidak satupun yang diselenggarakan tanpa tujuan. Namun mengingat situasi dan kondisi ketika itu tidak memungkinkan tujuan-tujuan secara kurikuler, institusional, apalagi tujuan secara nasional untuk dirumuskan. Pendiri NWDI dan NBDI berpikir bahwa masyarakat mengalami situasi yang terpuruk dalam sosiokultural dan religius, dan kondisi itu merupakan akibat dari kebijakan pemerintah kolonial ketika itu. Yang pertama kali harus dibangun saat itu adalah kesadaran akan harkat dan martabat sebagai individu, sebagai masyarakat, dan sebagai bangsa yang memiliki kedudukan yang sama satu sama lain. Selanjutnya, mereka memiliki agama, tetapi ketika itu mereka belum memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana ajaran agama (Islam) itu dijalankan. Sarana yang paling

mungkin untuk membangun kesadaran itu adalah pendidikan, dan pilihan itu adalah madrasah.

Dalam catatan sejarah ini, pendiri NWDI dan NBDI tidak saja sebagai inisiator ide pendirian madrasah, tetapi sekaligus sebagai pelaksana dan pengajar/ustadz bagi santri-santrinya. Fenomena ini perlu dicatat bahwa sebagai penggagas ide tentang perlunya bangunan kesadaran masyarakat ketika itu akan harkat dan martabat sebagai individu dan masyarakat, paham betul ke mana kesadaran itu diarahkan dan dibangun? Secara tersamar, sesungguhnya tujuan pendidikan melalui madrasah NWDI dan NBDI sudah tergambar, minimal melalui beberapa mata pelajaran yang diajarkan. Melihat fenomena sejarah sebagaimana makna pendidikan melalui NWDI dan NBDI, benarliah apa yang dikatakan Simpson dkk (2005), bahwa pada tingkat praktis pendidikan adalah proses rekayasa sosial. Dan tidaklah berlebihan jika *Tuan Guru* Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid disebut selaku arsitek yang merancang perubahan sosial, kultural, dan agama untuk menuju pada peradaban yang lebih baik dengan mulai membangun kesadaran individu dan masyarakat ketika itu.

b. Pendidikan sebagai Tujuan

Pada awalnya memang tampak bahwa secara samar tujuan sudah dirancang, yakni terbangunnya kesadaran santri/siswa atas situasi sosiokultural dan religius yang berkembang akibat kolonialisme, namun bangunan kesadaran itu merupakan sebuah kondisi yang akan terjadi dalam diri santri/siswa setelah menyelesaikan proses pendidikannya.

Menurut catatan sejarah perjalanan kedua madrasah ini, yang terpikir pertama kali adalah pembentukan madrasah. Minimal itulah yang tampak secara formal, karena rumusan-rumusan tujuan penyelenggaraan madrasah secara administratif belum tampak, jika dikaitkan kondisi ketika itu. Barulah pada tahap berikutnya, muncul pemikiran tentang tujuan akhir, yakni terbangunnya kesadaran sosiokultural dan religius para santri/siswa madrasah. Kondisi ini

dibuktikan melalui dirancangnya pengelompokan santri madrasah berdasarkan kelompok usia menjadi tiga kelompok (satuan pendidikan), kejelasan kelompok mata pelajaran yang diajarkan (kurikulum), dan waktu belajar (jadwal dan lama menempuh pendidikan). Tampak pula bahwa tujuan pendidikan sudah mulai dirumuskan, walaupun dalam catatan ini, apa substansi tujuan pendidikan tersebut tidak secara jelas dikemukakan, namun secara implisit dapat dipahami melalui kelompok mata pelajaran yang diajarkan pada masing-masing satuan pendidikan.

Dari gambaran ini pula dapat dipahami telah muncul pemikiran pendidikan (termasuk madrasah) sebagai suatu sistem, yang terdiri atas subsistem input, subsistem proses, dan subsistem output. Selanjutnya, hubungan antarsubsistem tidak terjadi dalam ruang kosong, melainkan terjadi dalam konteks hubungan guru-siswa secara direksional dalam rangka membangun perilaku ideal ;kognitif, afektif, dan psikomotor (Bloom, 1979). Selanjutnya, dalam proses untuk mencapai sejumlah perilaku ideal, secara spesifik juga terjadi interaksi antara subsistem input dengan materi pelajaran yang akan dipelajari dalam kurun waktu tertentu (Katz, dalam Berns, 2004).

Proses pembelajaran melalui madrasah NWDI dan NBDI dengan tujuan tercapainya perilaku ideal melalui sejumlah materi pelajaran sebagaimana dikatakan Bloom dan Katz merupakan pertimbangan psikologis berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik (santri). Tercapainya sejumlah perilaku ideal (kognitif, afektif, dan psikomotor), dalam konteks makna sejarah menurut Dewey (dalam Meyerhoff, 1959), makna pendidikan (madrasah NWDI dan NBDI) telah mengalami pergeseran/evolusi dari **makna pendidikan sebagai alat/instrumen** ke **makna pendidikan sebagai tujuan**.

Disadari atau tidak, pengelompokan santri (madrasah NWDI dan NBDI) dalam satuan pendidikan, kurikulum dan mata pelajaran, lama belajar, dan lainnya yang secara langsung dan tidak langsung terkait dengan tercapainya tujuan pembelajaran telah mengakomodasi pikiran tentang tahapan perkembangan

moralitas Kohlberg (dalam Crain, 2007). Kohlberg membagi perkembangan moralitas individu atas enam tahap; kepatuhan dan orientasi hukum, individualisme dan pertukaran, hubungan antar pribadi yang baik, memelihara tatanan sosial, kontrak sosial dan hak-hak individual, dan prinsip-prinsip universal. Secara khusus menyangkut keenam tahap ini tidak dibahas dalam konteks ini. Namun, paling tidak dapat dipahami keterkaitan antara masing-masing tahapan perkembangan ini dan implikasinya dengan konfigurasi layanan pendidikan, sebagaimana pengalaman kongkret dalam sejarah Madrasah NWDI dan NBDI.

c. Pendidikan sebagai Alat dan Tujuan

Pemikiran bahwa pendidikan melalui Madrasah NWDI dan NBDI awalnya dihajatkan sebagai alat/instrumen membangun kesadaran sosiokultural dan religius, dan berikutnya berkembang menjadi tujuan untuk membentuk perilaku ideal (kognitif, afektif, dan psikomotor), itulah yang dapat dimaknai jika melihat perjalanan sejarah kedua madrasah ini, karena pemikiran atas keduanya terjadi dalam kurun waktu yang berbeda.

Pada perkembangan berikutnya, jika dihubungkan dengan pemikiran evolutif, yang mengalami perubahan itu tidak hanya konteks ruang dan waktu, tetapi variabel-variabel madrasah harus mampu mengikuti perubahan-perubahan itu. Artinya, pemaknaan atas fenomena pendidikan madrasah, termasuk NWDI dan NBDI tidak dapat dipandang sebagai dua hal yang partial dan muncul dalam kurun waktu sejarah yang berbeda. Perkembangan dewasa ini kedua makna pendidikan melalui NWDI dan NBDI sebagai alat/instrumen dan tujuan berjalan bersamaan.

Pemikiran tentang pentingnya kedua makna ini terutama jika dikaitkan dengan kondisi setelah kemerdekaan hingga dewasa ini, dan seterusnya. Murid-murid Madrasah NWDI dan NBDI yang secara langsung ikut mendampingi *Tuan Guru* Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam pengelolaan kedua madrasah ini dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan seputar pemaknaan

pendidikan sebagai semata-mata alat dan makna pendidikan sebagai semata-mata tujuan. Jika pendidikan dimaknai sebagai alat, apa tujuan pendidikan melalui madrasah ini? Apa sebenarnya yang ingin dicapai dengan pendidikan melalui madrasah jika dihubungkan dengan perkembangan dewasa ini? Sebaliknya, jika pendidikan dimaknai sebagai tujuan, lalu muncul pertanyaan di luar pendidikan madrasah. Siapa saja yang boleh dapat sekolah di madrasah? Metode apa saja yang sesuai untuk mereka, jika mereka dari kelompok yang berbeda-beda? Bagaimana mengakomodasi substansi pendidikan melalui madrasah dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah, mengingat madrasah adalah aset bangsa?

Untuk menjawab berbagai pertanyaan sebagaimana tersebut di atas, dan sebagai jawaban atas konsekuensi evolusi pemaknaan atas fakta sejarah, termasuk sejarah Madrasah NWDI dan NBDI, pemaknaan madrasah sebagai alat/instrumen dan sebagai tujuan dijalankan bersamaan. Namun, kebijakan ini bukannya tanpa tantangan, baik internal (santri, alumni, dan pengelola). Tantangan yang muncul dalam bentuk kekhawatiran bahwa madrasah sebagai *produsen* santri akan kehilangan jati diri, apalagi madrasah dibebani dengan substansi pelajaran umum. Kekhawatiran yang sama juga dialami oleh para santri pesantren di Pulau Jawa. Kesamaan kasus ini digambarkan dalam kajian Dhofier (1978) melalui kajiannya tentang Kestinambungan dan Perubahan Tradisi Pesantren (Tebuireng-Jombang). Dhofier menggambarkan kekhawatiran santri sehingga melakukan protes kepada KH Syamsuri, karena kebijakan pesantren yang mengarahkan para santri untuk sekolah ke SMP dan SMA sambil menempuh pendidikan pesantren. Arahan kyai agar para santri tidak hanya menguasai ilmu keagamaan (Islam), tetapi pada akhirnya mampu menjadi kelompok lain dalam masyarakat, seperti ahli hukum, dokter, insinyur, dan lain-lain.

Dari pemikiran di atas, selanjutnya para pengelola madrasah melakukan langkah-langkah strategis untuk menyandingkan **pendidikan madrasah**

sebagai alat/instrumen dan **sebagai tujuan**. Langkah-langkah strategis yang ditempuh, antara lain:

1. Integrasi kurikulum berdasarkan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan bidang agama. Maksud ini untuk memenuhi kebutuhan konteks sosio-kultural yang berkembang dewasa ini.
2. Dibukanya satuan pendidikan dari berbagai satuan pendidikan;TK/RA hingga PT. Masing-masing satuan pendidikan memiliki basis, sebagai kecenderungan perkembangan pembangunan masyarakat, seperti basis agama dengan sentuhan umum, seperti MI, MTs, MA, hingga Institut Agama Islam. Lalu pendidikan basis umum dengan sentuhan agama, seperti SMP, SMA, hingga STKIP. Selain itu ada pula pendidikan yang khusus berbasis agama (Islam), seperti Ma'had Darul Quran wal Hadist (MDQH).
3. Penyesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan konteks pendidikan dewasa ini, seperti pertimbangan mutu dan relevansi sebagai persiapan menghadapi konteks pembangunan pada level lokal, regional, dan global.

Terlepas dari kedua makna pendidikan di atas (sebagai alat dan sebagai tujuan), memaknai pendidikan pendidikan dalam konteks sejarah pendidikan NWDI dan NBDI merupakan proses modernisasi masyarakat Sasak. Indikator modernisasi menurut penulis adalah bahwa seseorang akan menjadi sadar akan hakikat dirinya sebagai mahluk individu, dan mahluk sosial, dan mahluk bertuhan. Konsep makna pendidikan sebagai proses merupakan proses menjadikan seseorang menjadi lebih taat pada Tuhan, taat pada norma yang berlaku, dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi dengan tidak tercerabut dari akar budayanya. Konsep ini sesuai dengan salah satu hadist yang mengatakan “*man ‘arafa nafsahu ‘arafa rabbahu*”, “siapa yang mengenali dirinya, ia akan mampu mengenal Tuhannya” (al Hadist).

2. Pendidikan Untuk Siapa?

Pemikiran bahwa pendidikan untuk siapa, tidak lepas dari persoalan pendidikan sebagai sistem; subsistem input, proses, dan output. Dari catatan dan fakta sejarah

Madrasah NWDI dan NBDI, dari urutan pendirian, yang pertama kali didirikan adalah madrasah untuk kaum pria (NWDI). Namun pada perkembangan berikutnya, ada tuntutan kebutuhan untuk mendirikan madrasah untuk kaum wanita (NBDI). Pemikiran ini sesungguhnya, dalam hal subsistem input, pendiri madrasah mengakomodasi dasar teologis bahwa “menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim (laki-laki dan perempuan)”. Jika dicermati lebih jauh, pendiri NWDI dan NBDI telah mempertimbangkan paradigma pemerataan kesempatan dalam hal jenis kelamin (gender prespektif), yakni **pendidikan untuk semua**.

Paradigma pendidikan untuk semua yang dikembangkan oleh pendiri NWDI dan NBDI tidak hanya untuk mengakomodasi dasar teologis di atas tentang kewajiban menuntut ilmu bagi muslim (laki-laki dan perempuan), tetapi juga mengakomodasi konteks sejarah ketika itu, yakni persoalan keterpurukan sosiokultural dan religius dialami oleh muslim laki-laki dan perempuan. Di samping itu, dengan pertimbangan kultural tidak semua masyarakat usia sekolah memiliki keinginan untuk sekolah (masuk di madrasah), dengan berbagai alasan; sekolah/madrasah adalah model pendidikan barat (Belanda), sekolah/madrasah adalah kewajaran bagi laki-laki, bukan perempuan, dan beberapa pertimbangan patriarkis lainnya. Jadi kehadiran paradigma pendidikan untuk semua muncul sebagai motivasi untuk mengikuti pendidikan (madrasah) ketika itu.

Gambaran dari paradigma tersebut tampak melalui pesan dan saran beliau (dalam bahasa Sasak) kepada pengelola madrasah ketika itu, yang dituturkan kembali oleh cucu sekaligus murid beliau, yakni Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainul Majdi, M.A., sebagai berikut: “*siq penting ne mele pede besekolah*”, ‘yang penting mereka mau sekolah’ (press-Com, 2005 dan terjemahan bebas bahasa Indonesia oleh penulis). Lebih lanjut digambarkan suasana pembelajaran ketika itu diwarnai dengan penampilan yang tidak uniformis, ada santri laki-laki yang memakai baju dan celana (panjang), dilengkapi topi. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki celana, boleh pakai sarung. Demikian juga dengan penampilan santri wanita, berjilbab (kerudung) tidak harus seragam, kain sarung, dan kebaya.

Gambaran lain yang sebagai fakta sejarah paradigma ini adalah dalam hal pembiayaan. Madrasah tidak menentukan jumlah pembayaran, bahkan tidak ada pembayaran sama sekali. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara bersama/massal oleh masyarakat, terutama dari para pemberi wakaf (terutama untuk gedung dan fasilitas pembelajaran).

ANALISIS MAKNA ILMU PENDIDIKAN

Pemahaman atas makna ilmu pendidikan, termasuk makna ilmu pendidikan melalui Madrasah NWDI dan NBDI tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang teori pendidikan (paedagogik) dari beberapa ahli pendidikan. Pemahaman atas teori pendidikan akan membantuk makna ilmu pendidikan dari suatu lembaga pendidikan dalam perspektif kesejarahan sebagaimana bahasan artikel ini.

Langeveld (dalam Siswoyo, 1955) menjelaskan; paedagogik adalah suatu ilmu yang bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari pula betapa hendaknya bertindak. Brodjonagoro (dalam Siswoyo, 1966) berpendapat bahwa ilmu pendidikan atau teori pendidikan adalah perenungan tentang pendidikan. Dalam arti luas mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktek pendidikan. Barnadib (1987) mengemukakan; ilmu pendidikan atau paedagogik adalah ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan, secara menyeluruh dan abstrak. Ilmu pendidikan, selain bercorak teoritis, juga bersifat praktis. Secara teoritis, pendidikan berhubungan dengan hal-hal normatif, menunjuk pada standar nilai tertentu, sementara secara praktis mengacu pada bagaimana pendidikan harus dilakukan.

Dari ketiga pendapat pakar pendidikan tentang ilmu pendidikan di atas terdapat dua hal yang menjadi benang merah di antara ketiganya, yakni ilmu pendidikan berhubungan dengan subjek dan objek pendidikan, dan bagaimana subjek dan objek pendidikan saling berhubungan dalam proses pendidikan. Persoalan subjek dan objek pendidikan sebagai gejala yang universal dalam pendidikan, dan bagaimana keduanya saling berhubungan dalam proses pendidikan bukanlah perkara sederhana, karena keduanya masih memerlukan sesuatu yang lain untuk mengantarkan

pemahaman yang komprehensif tentang makna ilmu pendidikan. Karena itu, dalam bahasan tentang makna ilmu pendidikan pada tulisan ini, penulis mengakomodasi penjelasan Barnadib (1987), dengan pertimbangan bahwa pendapat itu lebih mudah direduksi dengan fenomena pendidikan dalam keberadaan sejarah Madrasah NWDI dan NBDI.

Pemahaman atas makna ilmu pendidikan dalam perjalanan sejarah pendidikan Madrasah NWDI dan NBDI secara teoritis dan praktis dalam bahasan ini berhubungan dengan: 1) Komponen pendidikan Madrasah NWDI dan NBDI sebagai sistem pendidikan, 2) Objek formal pendidikan Madrasah NWDI dan NBDI, 3) Objek material pendidikan Madrasah NWDI dan NBDI, dan 4) metode pendidikan Madrasah NWDI dan NBDI. Sesuai dengan keberadaan fakta dan makna sejarah sebagaimana Dewey dan Popper, pengandaian praktek pendidikan melalui teori-teori pendidikan dan implementasi teori dalam praktek pendidikan sesuai perjalanan sejarah kedua madrasah ini akan diuraikan sesuai pemaknaan secara evolutif dengan mengacu pada awal kedua madrasah ini didirikan, lalu situasi yang berkembang dewasa ini, dan perkembangan pada masa yang akan datang (*futuristik*).

Komponen Pendidikan

Komponen pendidikan akan membantu pemahaman tentang makna ilmu pendidikan dalam sejarah pendidikan Madrasah NWDI dan NBDI dari segi komponen apa saja yang dirumuskan secara teoritis dalam kerangka sistem pendidikan. Komponen ini berhubungan dengan: dasar dan asas, fungsi, tujuan, dan isi.

1. Dasar dan Asas

Istilah dasar dan asas secara leksikal bermakna sama. Namun dalam konteks pendidikan di Indonesia, kedua kata ini digunakan dengan makna yang berbeda. Dasar pendidikan merupakan landasan berpijak dan arah bagi pendidikan sebagai wahana pengembangan manusia dan masyarakat (Sulistiyono, dalam Siswoyo dkk, 2007). Sedangkan asas pendidikan dimaknai sebagai prinsip atau ketentuan yang dijadikan pedoman dalam menjalankan pendidikan agar tujuan tercapai secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan (Hadisusanto, 1995).

Berdasarkan makna kedua kata tersebut, pada awal pendirian kedua madrasah ini (1936 dan 1943) belum tampak rumusan dasar pendidikan dan asas pendidikan secara eksplisit (paling tidak dalam catatan sejarah tidak tertulis). Yang tampak adalah dasar aqidah, yakni *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah 'ala Madzhabib al Imam al-Syafi'i*. Apa makna pernyataan ini secara substansial tidak dijelaskan pada bahasan ini karena menyangkut persoalan *fiqh*. Yang perlu dijelaskan adalah pilihan aqidah ini sebagai dasar dan asas pendidikan pada kedua madrasah itu dari sudut historis, sosiokultural, dan religius.

Secara historis, masyarakat Sasak di Lombok, sebagaimana masyarakat Indonesia umumnya ketika itu masih dalam pendudukan kolonialisme Belanda dan Jepang. Akibat dari itu, secara sosiokultural kondisi masyarakat Sasak sangat terbelakang dalam hal pendidikan, terutama pendidikan agama. Fenomena ini diakibatkan karena tekanan-tekanan pemerintah kolonial yang membatasi ruang untuk mempelajari agama (Islam). Kondisi ini sangat mungkin, mengingat pemerintah kolonial selalu mencurigai keberadaan gerakan ini sebagai gerakan anti pemerintah kolonial. Selanjutnya, secara religius, pemahaman agama (Islam) masyarakat ketika itu masih diwarnai dan dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, mengingat sebelumnya di Pulau Lombok dikuasai oleh kerajaan Hindu yang berpusat di Karangasem Bali. Lalu apa kaitannya dengan pendidikan sebagai instrumen/alat membangun kesadaran sosiokultural dan religius sebagai bangsa terjajah pada pembahasan sebelumnya, sementara dasar/asas/aqidah-nya bernuansa Islam? Persoalan pendidikan agama (Islam) adalah hal yang eksklusif, mengingat pemerintah kolonial ketika itu sedikit lebih lunak menyikapi pergerakan di bidang keagamaan. Namun sesungguhnya, di balik hal yang eksklusif tersebut terkandung maksud yang inklusif yakni membangun kesadaran kebangsaan sebagai bangsa yang sedang terjajah. Dari hal yang inklusif tersebut muncullah nama madrasah, yakni *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah*, dari empat kata: *Nahdlatul* dari kata *Nahdlah* 'gerakan' *Wathan* dari kata *Wathani* 'bangsa' atau 'kebangsaan', lalu *Diniyah* 'keagamaan', dan *Islamiyah* 'bersifat Islam' atau sesuai ajaran agama Islam. Jadi, selain untuk pendidikan agama

(Islam), pendidikan melalui kedua madrasah ini sudah menyentuh pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan.

Dalam perkembangan berikutnya, setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamkan pada 17 Agustus 1945, keberadaan aqidah dibedakan dengan asas, di mana aqidah *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah 'ala Madzhab al Imam al-Syafi'i* tetap sebagai aqidah, namun asas disesuaikan dengan asas negara, yakni Pancasila dan UUD 1945.

Menarik untuk dikemukakan pada bagian ini adalah dengan pola terbalik (flash back), model eklektik-inkorporatif (Barnadib, 2002) dalam pemahaman Pancasila sebagai dasar dan asas pendidikan nasional dengan aqidah pendidikan NWDI dan NBDI sudah mulai tampak secara tersirat. Fenomena tersebut tampak pada konstelasi sebagian dasar Pancasila dengan aqidah pendidikan kedua madrasah ini. Fenomena tersebut antara lain melalui pemikiran tentang penyempurnaan pemahaman dan praktek ajaran Islam (ketuhanan), derajat kemanusiaan yang setara (kemanusiaan), dan jiwa kebangsaan sebagai bangsa Indonesia yang merdeka (kebangsaan).

2. Fungsi

Fungsi pendidikan merupakan serangkaian tugas atau misi yang diemban dan harus dilaksanakan (Hadisusanto dalam Siswoyo, 1995). Dalam kerangka dialektika pendidikan melalui kedua madrasah ini dengan masyarakat, sesuai fungsi pendidikan menurut Hadisusanto, yakni fungsi *preservatif* dan fungsi *direktif*. Fungsi *preservatif*, yakni pendidikan dilakukan untuk melestarikan nilai dan tatanan sosial yang ada dalam masyarakat, sementara fungsi *direktif* sebagai agen pembaharuan sosial sehingga dapat mengantisipasi masa depan. Sebagai fungsi *preservatif*, kedua madrasah ini lahir dalam rangka mempertahankan ajaran Islam yang ketika itu diwarnai oleh ketidakpastian akibat tekanan pemerintah kolonial dan pengaruh ajaran Hindu. Sebagai fungsi *direktif*, kedua madrasah ini lahir untuk cita-cita kemerdekaan.

Dalam perkembangan berikutnya hingga dewasa ini, keberadaan kedua fungsi tersebut sudah berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Fungsi *preservatif* dalam rangka mempertahankan tatanan nilai tidak hanya melalui pemahaman agama Islam, tetapi nilai-nilai sosiokultural yang dianut oleh masyarakat Sasak di Lombok sebagai kelompok etnis dan bagian integral negara-bangsa, Indonesia. Fungsi *direktif* tidak semata mengacu pada cita-cita kemerdekaan dari kondisi terjajah, namun beralih kepada kemerdekaan hahiki. Bebas dari kebodohan, kemiskinan, ketakutan, intimidasi, dan lainnya. Perubahan/evolusi fungsi tersebut diikuti dengan evolusi dalam hal organisasi madrasah, evolusi program pendidikan, dan lain-lain dalam kerangka sistem pendidikan.

3. Tujuan

Tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan. Dewey (dalam Brown, 1970) membedakan tujuan pendidikan menjadi dua; tujuan umum dan tujuan khusus. Kedua jenis tujuan tersebut masih harus disesuaikan dengan level pendidikan di mana tujuan itu akan dicapai (satuan pendidikan). Masih menurut Dewey melalui sumber yang sama, tujuan pendidikan harus merupakan suatu yang dapat diamati, berdasar pengalaman, dan mengandung aspek intelegensi, dan dalam konteks perjalanan waktu merupakan hal yang berkelanjutan (kontinum). Dalam konteks pendidikan di Indonesia, diperkenalkan adanya tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional (Siswoyo dkk, 2007). Apapun kriteria, level, dan keberadaan tujuan pendidikan, akhir dari semua tujuan pendidikan adalah tercapainya kebahagiaan yang sempurna (Notonagoro dalam Siswoyo, 2007).

Terkait dengan rumusan tujuan di atas, pemikiran tentang hal tersebut sudah tampak ketika munculnya ide tentang pembagian kelompok santri/siswa berdasarkan usia (psikologi perkembangan) dalam level pendidikan, seperti level *Ilzamiyah*, *Tahdhiriyah*, dan *Ibtidaiyah* (tujuan institusional). Lalu pembagian mata pelajaran, seperti *tauhid*, *fiqh*, dan *qawa'id al-laughah al-Arabiyyah* pada level *Ilzamiyah* dan *Tahdhiriyah*. Mata pelajaran lain, seperti *Nahwu*, *Sarf*,

Balaghah, Ma'ani, Badi', Bayan, Manthiq, Usul al-Fiqh, Tasawwuf, dan lainnya pada level *Ibtidaiyah* (tujuan kurikuler). Fenomena sebagaimana yang terjadi dalam perjalanan Madrasah NWDI dan NBDI tampaknya juga mengakomodasi perjalanan sejarah pendidikan Islam ketika zaman sahabat dan khalifah, yakni adanya pertimbangan pembagian pendidikan dari sudut tujuan, usia, dan kelompok mata pelajaran yang diajarkan (Yunus, 1989).

Dalam perspektif sejarah, keberadaan tujuan pendidikan melalui kedua madrasah ini mengalami evolusi sesuai perkembangan yang terjadi dalam pembangunan pendidikan di Indonesia, namun masih merupakan kelanjutan (kontinum) dari tujuan-tujuan pendidikan pada masa awal ketika kedua madrasah tersebut didirikan. Perkembangan tujuan pendidikan juga berkembang sesuai dengan perkembangan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan kedua madrasah ini, seperti perkembangan jenis lembaga pendidikan umum dengan nuansa agama (Islam) dan pendidikan agama (Islam) dengan nuansa pendidikan umum. Perubahan (lebih tepat penyesuaian) dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan pendidikan secara nasional.

4. Isi

Isi pendidikan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk pertumbuhan pertumbuhan. Isi pendidikan berupa; nilai, pengetahuan, dan keterampilan (Driyarkara, dalam Siswoyo dkk, 2007). Pada awalnya, isi pendidikan melalui Madrasah NWDI dan NBDI masih terbatas pada dua kategori, yakni nilai dan pengetahuan agama. Nilai yang dimaksud adalah nilai perjuangan dan nilai kemerdekaan melalui penyadaran sosiokultural karena ketika itu dalam tekanan pemerintah kolonial. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan agama (Islam), dengan alasan; pertama, kenyataan masih belum sepenuhnya pelaksanaan syariat Islam akibat dari tekanan kolonial dan pengaruh ajaran Hindu yang dibawa oleh Kerajaan Hindu yang menguasai Lombok sebelum kedatangan pemerintah kolonial Belanda. Kedua, ada maksud terselubung pemerintah kolonial Belanda untuk melunturkan fanatisme Islam melalui pembukaan kesempatan pribumi mengenyam pendidikan umum, sebagai

benteng atas *volcano Islam* (van der Prijs) sebagaimana analisis Hurgronje (Nizar, ed. 2007). Pertimbangan isi pendidikan melalui Madrasah NWDI dan NBDI, pada saat yang sama juga dikembangkan oleh pesantren-pesantren di Jawa Timur dalam konteks yang sama (menghadapi pemerintah kolonial Belanda) (Soetjiatiningsih dkk, 1981).

Objek Formal Pendidikan Madrasah NWDI dan NBDI

Objek formal pendidikan berkaitan dengan bagaimana komponen-komponen teoritis diimplementasikan/diwujudkan dalam praktek pendidikan pada Madrasah NWDI dan NBDI. Dengan kata lain, objek formal memberikan sudut pandang proses pendidikan dilaksanakan melalui kedua madrasah ini, sehingga pendidikan melalui keduanya memiliki kedudukan dialektik terhadap masyarakat di mana pendidikan dilaksanakan. Sudut pandang yang penting dibahas, antara lain; filsafat, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan agama.

1. Filsafat

Pandangan filsafat dalam konteks ini mengacu pada pemaknaan aktivitas mendidik melalui kedua madrasah ini dilakukan untuk kepentingan apa? Sebagaimana diuraikan pada isi, aktivitas mendidik melalui kedua madrasah ini berkaitan erat dengan situasi yang berkembang pada awal ide pendirian kedua madrasah ini (fenomena sejarah), yakni keterpurukan sosiokultural dan religius akibat tekanan kolonial dan pengaruh agama Hindu. Karena itu, pendidikan melalui keduanya dilakukan untuk kepentingan penanaman nilai pergerakan dan perjuangan ke arah kemerdekaan dan pengetahuan agama.

2. Psikologi

Psikologi dalam konteks ini mengacu pada jenis pendidikan melalui kedua madrasah ini dihubungkan dengan bagaimana pendidikan dilakukan di dalamnya. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pendidikan dibagi dalam kelompok usia, satuan pendidikan, dan penjenjangan kurikulum/mata pelajaran, lama belajar.

Bagaimana pendidikan dilakukan melalui lembaga pendidikan tertentu, termasuk madrasah, tidak lepas dari proses pendidikan sebagai human relation. Sebagai bentuk human relation, faktor yang penting adalah komunikasi (Barnadib, 1996). Dari sudut ini, komunikasi dalam proses pendidikan melalui Madrasah NWDI dan NBDI dilakukan; pertama melalui transmisi lisan (*oral transmission*), sebagaimana model komunikasi pada pendidikan Islam Klasik. Model ini dilakukan dengan keyakinan bahwa mendengar langsung dari syaikh dianggap sebagai metode yang paling baik. Kedua, model transmisi tulisan yakni dengan mencatat teks yang didiktekan *mudarris* (Nata, 2004). Selebihnya, kedua model komunikasi tersebut diikuti pula dengan menghafal, memahami, dan berdiskusi (sebagaimana dituturkan oleh Sinarep Udin dkk).

3. Sosiologi dan Ekonomi

Dari sudut sosiologi, fungsi pesantren al-Mujahiddin dengan Madrasah NWDI dan NBDI bagi masyarakat pada awalnya tidak lepas dari fenomena sejarah ketika keduanya didirikan, yakni; sebagai wadah penanaman nilai perjuangan/pergerakan kemerdekaan dan sebagai wadah penanaman pemahaman ajaran Islam. Pengelolaan wadah ini didanai oleh sumber dana wakaf dari para dermawan muslim ketika itu. Kondisi ini merupakan suatu tradisi pesantren di Indonesia (Azra, 1999).

4. Agama

Agama (Islam) merupakan ciri yang paling esensi dari keberadaan pesantren. Motivasi yang mendasari kelahiran pesantren dan madrasah utamanya adalah agama, di samping motivasi-motivasi lain (Nata, 2004). Motivasi agama (Islam) dan pergerakan kemerdekaan sebagai motivasi kelahiran Madrasah NWDI dan NBDI muncul secara bersamaan. Fenomena sejarah sebagai bukti keduanya adalah nama dalam kesatuan pergerakan kebangsaan dan agama Islam; *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah*, dari empat kata: *Nahdlatul* dari kata *Nahdlah* ‘gerakan’ *Wathan* dari kata *Wathani* ‘bangsa’ atau ‘kebangsaan’, lalu *Diniyah* ‘keagamaan’, dan *Islamiyah* ‘bersifat Islam’ atau sesuai ajaran agama Islam.

Objek Material Pendidikan Madrasah NWDI dan NBDI

Objek material pendidikan berkaitan dengan bagaimana keberadaan manusia sebagai objek material pendidikan melalui kedua madrasah ini. Langeveld (dalam Barnadib, 2002) memandang manusia sebagai *animal educandum*, yaitu makhluk yang dapat dididik dan dapat mendidik. Dari pemahaman ini, jika dihubungkan dengan keberadaan Madrasah NWDI dan NBDI, pada awal pendirian keduanya, masyarakat dalam kondisi lemah dan pasif yang perlu disadarkan pada fenomena sejarah yang berkembang ketika itu. Di pihak lain, tokoh sejarah (pendiri) merupakan motivator dan inisiator dari gerakan penyadaran itu.

Metode Pendidikan Madrasah NWDI dan NBDI

Dari sudut pandang metode sebagai unsur penting dalam pendidikan sebagai ilmu, metode yang dikembangkan dan mendasari pendirian Madrasah NWDI dan NBDI adalah metode normatif. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa konsep manusia ideal menurut tokoh (pendiri) adalah pemahaman masyarakat atas nilai baik dan buruk melalui pemahaman Islam secara benar dan kesadaran atas fenomena sosiokultural ketika itu (tekanan kolonial).

PERSPEKTIF PENULIS TENTANG MAKNA PENDIDIKAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jika dari sudut sejarah, pendidikan melalui Madrasah NWDI dan NBDI dipandang sebagai alat dan tujuan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan konteks sejarah waktu itu, dalam perspektif universal penulis memandang pendidikan sebagai proses humanisme untuk membangun kesadaran kemanusiaan dan kesadaran ketuhanan. Proses humanisme yang dimaksud adalah pendidikan berlangsung dalam konteks hubungan antarmanusia (*human relationship*) yang di dalamnya terjadi interaksi dan komunikasi yang wajar, terbuka dan demokratis. Bangunan kesadaran merupakan hasil akhir dari proses pendidikan dalam bentuk kesadaran manusia sebagai manusia pribadi dan berada di antara manusia-manusia lainnya. Kesadaran juga berhubungan dengan kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi melalui proses pendidikan akan terbangun hubungan yang harmonis antara manusia sebagai makhluk individu dan makhluk bertuhan (*Hablumminannaas dan hablumminallah*).

Sementara ilmu pendidikan, menurut hemat penulis menyangkut sejumlah konsep dan teori tentang makna pendidikan sebagai proses humanisme untuk membangun kesadaran kemanusiaan dan kesadaran ketuhanan, yang di dalamnya terdapat berbagai komponen ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Jadi, sebagai ilmu (pedagogik), ilmu pendidikan masih perlu implementasi dalam praksis pendidikan (pedagogi) sehingga menjadi ilmu yang dialektis antara teori dan praktek.

SIMPULAN

Dari uraian-uraian di atas disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keberadaan Madrasah NWDI dan NBDI dari sudut makna pendidikan mengalami evolusi/perkembangan sebagai kontinum makna ketika sejarah pertama kali terjadi, masa kini, dan masa yang akan datang. Makna pendidikan ketika kedua madrasah ini didirikan adalah sebagai instrumen untuk membangun kesadaran akan harkat dan martabat sebagai bangsa dalam naungan ajaran Islam. Selanjutnya makna itu berkembang menjadi tujuan, yakni tercapainya kesadaran sebagaimana penjelasan makna pendidikan sebagai alat. Lalu makna itu berkembang menjadi kedua-duanya (alat dan tujuan) dengan substansi yang berbeda, yakni alat untuk tercapainya sejumlah kecerdasan. Capaian-capaian yang diharapkan diikuti dengan perubahan dalam kerangka sistem pendidikan.
2. Dalam hal sasaran, pendidikan melalui Madrasah NWDI dan NBDI diperuntukkan bagi semua (pendidikan untuk semua). Fenomena sejarah menunjukkan bahwa selain mendirikan madrasah untuk laki-laki (Nahdlatul Wathan), tokoh (pendiri) juga mendirikan madrasah untuk wanita (Nahdlatul Banat). Pemikiran ini mengakomodasi tuntutan landasan teologis (Islam) yang termuat dalam al-Qur'an dan Hadist.
3. Dalam perjalanan sejarah, fenomena fisik Madrasah NWDI dan NBDI sudah membuktikan keberadaan ilmu pendidikan sebagai ilmu (deduktif) melalui unsur-unsur yang menyaratkannya, yakni komponen sistem, objek formal, objek material, dan metode.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*. Jakarta. Logos Wacana Ilmu.
- Barnadib, Imam. (2007). *Materi Kuliah Pendidikan dalam Perspektif Historis*. Program S3 Ilmu Pendidikan PPs UNY.
- Barnadib, Imam. (2002). *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta. Adicita Karya Nusa.
- Barnadib, Imam. (1996). *Dasar-Dasar Kependidikan; Memahami Makna dan Perspektif Beberapa Teori Pendidikan*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Barnadib, Iman. (1982). *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta. FIP IKIP Yogyakarta.
- Berns, M Roberta. (2004). *Child, Family, School, Community: Socialization and Support*. US. Thomson Wadsworth Juraid, bdul Latif. 2006. *Manusia, Filsafat, dan Sejarah*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Brickman, William W. (1949). *Guide to Research Educational History*. New York. New York University Bookstore.
- Bloom, Benjamin S. (1979). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. London. Longman Group LTD.
- Brown, Leslie M. (1970). *Aims of Education*. New York. Columbia University, Teachers Colledge Press.
- Buchori, Mochtar. (1994). *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan dalam Renungan*. Jakarta. IKIP Muhammadiyah Press.
- Crain, William. (2007). *Teori Perkembangan: Konsep dan Aplikasi* (terjemahan dari judul asli: *Theories of Development, Concepts and Aplications*, oleh Yudi Santoso). Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Dhofier, Zamakhsyari. (1978). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta. LP3ES.
- Kartono, Kartini. (1997). *Tinjauan Politik mengenai Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Knight, George R. (1982). *Issues and Alternatives in Educational Philosophy*. Michigan. Andrew University Press, Berrien Springs.
- Mestoko dkk, (1985). *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta. Balai Pustaka.

- Meyerhoff, Hans (Eds). (1959). *The Philosophy of History in Our Time: An Anthology*. New York. A Doubleday Anchor Books.
- Muhammad Jamal ad Din al Qasimi ad Dimasyqi. *Mauizah al Mu'minin min ihya' ulum ad Din* (ttp: Maktabah at Tijariyah al Kubra, tt), hlm.7.
- Nata, Abuddin (ed). (2004). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Nizar, Samsul (ed). (2007). *Sejarah Pendidikan Islam; Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Noor, Mohammad dkk, (2004). *Visi Kebangsaan dan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, 1904-1997*. Jakarta. Logos.
- Palmer, Richard E. (2003). *Hermenutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi* (Terjemahan dari buku *Hermeunetics: Interpretation Theory in Schleirmatcher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- QS ar-Ra'd (13): 11*. Surakarta. Al Waah.
- Simpson, Douglas J at-all. (2005). *John Dewey and The Art of Teaching: Toward Reflective and Imaginative Practice*. London. Sage Publications.
- Siswoyo dkk, (2007). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta. FIK UNY.
- Soetjatiningsih dkk, (1981). *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur*. Jakarta. Depdikbud.
- Syakur, Abdul Ahmad. (2006). *Islam dan Kebudayaan: Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Sasak, TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid Agen Pembaharuan Budaya Sasak 1904-1997*. Yogyakarta. Adab Press Fak. Adab UIN Yogyakarta.
- Yunus, Mahmud. (1989). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta. Hidakarya Agung.